



**Njo Investasi  
Mayar Izine**  
DPMPSTSP MENUJU WBBM



PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**DPMPSTSP**

# DATA POKOK PERANGKAT DAERAH

**TAHUN 2025 TRIWULAN IV**  
**OKTOBER 2025 - DESEMBER 2025**

**HUBUNGI KAMI :**



[dpmpstsp.temanggungkab.go.id](http://dpmpstsp.temanggungkab.go.id)



[dpmpstsp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmpstsp.temanggungkab)



[dpm\\_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

**DATA POKOK PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BIDANG PENANAMAN MODAL**

**1. Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah daerah atau RKPD Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil”.

Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi RKPD Tahun 2025–2029 adalah Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Indikator ini menggambarkan total nilai investasi yang telah terealisasi di Kabupaten Temanggung, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode tertentu.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak asing, meliputi perorangan, badan usaha, atau pemerintah negara lain, untuk menanamkan modalnya dan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha nasional, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

Indikator Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN berperan penting dalam mengukur tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Temanggung, serta menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan. Rumus sederhananya yang digunakan untuk mengukur Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut

$$\text{Jumlah Realisasi Investasi} = \text{Realisasi PMA} + \text{Realisasi PMDN}$$

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN**  
**Tahun 2021-2025**

| NO | URAIAN                        | TAHUN |       |       |       |         |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|    |                               | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025    |
| 1  | Jumlah investasi PMDN         | 1.486 | 1.529 | 1.326 | 1.923 | 1.864,1 |
| 2  | Jumlah investasi PMA          | 10    | 306   | 719   | 221   | 295,8   |
| 3  | Jumlah investasi PMA dan PMDN | 1.496 | 1.836 | 2.046 | 2.145 | 2.159,9 |

Sumber : OSS.go.id  
Ket : dalam Milyar

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2021–2025. Secara umum, total nilai investasi mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 Triwulan IV realisasi investasi sebesar Rp. 2.159,9 Milyar. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam RENJA DPMPTSP Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 2.150 Milyar.

Pada tahun 2021, total realisasi investasi PMA dan PMDN tercatat sebesar Rp1.496 miliar, yang didominasi oleh investasi dari PMDN sebesar Rp1.486 miliar, sementara kontribusi PMA masih relatif kecil yaitu sebesar Rp10 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi pada tahun tersebut lebih banyak digerakkan oleh pelaku usaha dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan signifikan terutama pada investasi asing (PMA) yang meningkat dari Rp. 306 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 719 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini turut mendorong peningkatan total investasi dari Rp. 1.836 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 2.046 miliar pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, total realisasi investasi mencapai Rp. 2.145 miliar, yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan investasi dalam negeri yang mencapai Rp.1.923 milyar, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi daerah serta perbaikan iklim investasi.

Secara keseluruhan, perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN periode 2021–2025 mencerminkan masih dominannya peran investor dalam negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, peningkatan kontribusi investasi asing dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi positif dalam penguatan kemitraan global dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan

perizinan, serta penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompetitif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

## **2. Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) DPMPTSP**

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nilai IKM mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap unsur-unsur pelayanan sebagai prioritas peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata- rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang Total}}{\text{unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ unit pelayanan} \times 25$$

**Tabel 2.1**  
**Nilai Indek Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2021-2025**

| No | Tahun | Nilai |       |        |       |
|----|-------|-------|-------|--------|-------|
|    |       | TW I  | TW II | TW III | TW IV |
| 1  | 2021  | 85,50 | 84,03 | 87,86  | 88,82 |
| 2  | 2022  | 85,48 | 87,95 | 86,67  | 89,41 |
| 3  | 2023  | 84,20 | 85,20 | 84,56  | 89,32 |
| 4  | 2024  | 90,72 | 91,24 | 92,24  | 92,27 |
| 5  | 2025  | 92,98 | 93,01 | 94,91  | 96,03 |

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

**3. Nilai AKIP DPMPTSP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), INSPEKTORAT melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*).

Komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan variabel dari penilaian SAKIP.



Tabel 3.1  
Penilaian Kinerja  
Tahun 2021-2025

| No. | Komponen                                | Bobot         | Nilai        |              |              |              |              |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |   |               | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1   | Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 24,79        | 20,70        | 20,70        | 21,90        | 22,80        |
| 2   | Pengukuran Kinerja                      | 30,00         | 15,39        | 20,40        | 20,40        | 21,90        | 26,10        |
| 3   | Pelaporan Kinera                        | 15,00         | 11,06        | 10,05        | 10,05        | 10,50        | 12,60        |
| 4   | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00         | 16,67        | 16,67        | 17,50        | 15,00        | 20,00        |
|     | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      | <b>100,00</b> | <b>67,91</b> | <b>68,65</b> | <b>68,65</b> | <b>69,30</b> | <b>81,50</b> |

Sumber : DPMPTSP Data diolah Tahun 2025 triwulan IV

Berdasarkan Tabel 3.1, penilaian kinerja menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021–2025. Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari 67,91 pada tahun 2021 menjadi 81,50 pada tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja mengalami perkembangan positif, menunjukkan perbaikan dalam penetapan sasaran dan pengukuran capaian yang lebih akurat. Pelaporan Kinerja juga menunjukkan peningkatan kualitas penyajian data, sedangkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengindikasikan peningkatan efektivitas pelaksanaan evaluasi internal.

#### 4. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Temanggung adalah jumlah modal yang benar-benar sudah ditanamkan oleh investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) dalam kegiatan usaha di wilayah Temanggung. Angka ini menunjukkan berapa besar investasi yang sudah masuk dan digunakan untuk menjalankan atau membangun proyek.

Di Temanggung, realisasi investasi umumnya didominasi oleh PMDN, karena banyak berasal dari pelaku usaha lokal dan UMKM, sementara PMA tetap ada namun lebih kecil. Nilai realisasi ini penting karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kepercayaan investor, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi yang berdampak pada lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berikut rumus menghitung nilai realisasi investasi :

$$\text{Nilai Realisasi Investasi} = \text{Realisasi Investasi PMA} + \text{Investasi PMDN}$$

Tabel 4.1  
 REKAPITULASI INVESTASI PMDN dan PMA  
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025  
 (Triwulan IV)

| NO | BULAN                  | INVESTASI PMDN             | INVESTASI PMA               | TOTAL REALISASI             |
|----|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Januari                | Rp. 139.335.349.012        | Rp. 94.945.880.692          | Rp. 234,281,229,704         |
| 2  | Februari               | Rp. 186.405.251.100        | -                           | Rp. 186,405,251,100         |
| 3  | Maret                  | Rp. 55.709.965.001         | -                           | Rp. 55,709,965,001          |
| 4  | April                  | Rp. 632.023.397.014        | -                           | Rp. 632,023,397,014         |
| 5  | Mei                    | Rp. 23.476.950.930         | -                           | Rp. 123,476,950,930         |
| 6  | Juni                   | Rp. 54.542.520.002         | -                           | Rp. 54,542,520,002          |
| 7. | Juli                   | Rp. 117.595.991.500        | Rp. 60.030.000.000          | Rp. 177,625,991,500         |
| 8. | Agustus                | Rp. 229.323.425.580        | Rp. 86.030.000.000          | Rp. 315,353,425,580         |
| 9  | September              | Rp. 113.936.267.281        | -                           | Rp. 113,936,267,281         |
| 10 | Oktober                | Rp. 10.507.500.000         | Rp. 83.879.412.747          | Rp. 94,386,912,747          |
| 11 | November               | Rp. 44.253.656.472         | Rp. 46.626.870.805          | Rp. 90,880,527,277          |
| 12 | Desember               | -                          | Rp. 81.318.150.000          | Rp. 81,318,150,000          |
|    | <b>Total Investasi</b> | <b>Rp. 295.767.037.164</b> | <b>Rp.1.864.173.550.972</b> | <b>Rp.2,159,940,588,136</b> |

Sumber :Dashboard OSS.go.id

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Kabupaten Temanggung mencatat perkembangan investasi yang cukup signifikan, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, nilai investasi menunjukkan dinamika yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi daerah.

Investasi PMDN menjadi kontributor terbesar dengan total nilai Rp.1.893.354.998.112. Puncak investasi PMDN terjadi pada bulan April, mencapai Rp. 632.023.397.014, yang menunjukkan adanya realisasi proyek berskala besar pada bulan tersebut. Sementara itu, bulan Maret dan Mei mencatat angka investasi yang relatif lebih rendah, namun tetap berkontribusi terhadap akumulasi total triwulan.

Di sisi lain, investasi PMA mencatat total nilai Rp. 241.005.880.000. Aktivitas penanaman modal asing terpantau hadir terutama pada bulan Januari, Juli, dan Agustus. PMA tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan nilai Rp. 86.030.000.000, diikuti oleh bulan Januari sebesar Rp. 94.945.880.692 dan bulan Juli sebesar Rp. 60.030.000.000. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan investor luar negeri terhadap sektor-sektor strategis di Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan, capaian investasi pada Triwulan Iv tahun 2025 menunjukkan kondisi yang positif. Kombinasi investasi PMDN dan PMA

mencerminkan meningkatnya minat investor dalam mengembangkan berbagai sektor usaha di Kabupaten Temanggung. Data ini sekaligus menjadi indikator bahwa iklim investasi daerah semakin kondusif dan kompetitif.

5. Persentase Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu

Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari seluruh layanan yang berhasil diselesaikan *tepat waktu* sesuai dengan standar durasi yang telah ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur).

Persentase ini menghitung berapa banyak layanan yang benar-benar selesai dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin baik kinerja dalam memberikan layanan cepat, tepat, dan sesuai standar. Rumus yang digunakan dalam menghitung adalah sebagai berikut :

Jumlah Layanan Yang Memenuhi Standar Waktu

Persentase Layanan Tepat Waktu =  X100%

Total Layanan

Tabel 5.1  
Data Perizinan  
tahun 2025 (Triwulan Iv)

| NO   | JENIS IZIN                                     | TOTAL       |                  |                      |
|--|--|-------------|------------------|----------------------|
|  |  | JUMLAH IZIN | IZIN YANG TERBIT | PROSEN TASE IZIN (%) |
| A. IZIN POKOK  |  |             |                  |                      |
| 1  | Izin Perubahan Penggunaan Tanah                | 28          | 28               | 100                  |
| 2  | PBG  | 113         | 113              | 100                  |
| 3  | SLF  | 31          | 31               | 100                  |
| 4  | Pemecahan IMB                                  | 158         | 158              | 100                  |
| 5  | PKK(R Non Berusaha                             | 59          | 59               | 100                  |
| B. IZIN BIDANG USAHA   |  |             |                  |                      |
| 6  | NIB  | 9938        | 9938             | 100                  |
| 7  | IJIN TRAYEK                                    | 68          | 68               | 100                  |
| 8  | IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME                   | 617         | 617              | 100                  |
| 9  | IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA                    | 6           | 6                | 100                  |
| C. IZIN OPERASIONAL  |  |             |                  |                      |
| 10   | Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan       | 81          | 81               | 100                  |
| 11   | Surat Izin Operasional Puskesmas               | 1           | 1                | 100                  |
| 12   | Sertifikat Laik HYGINE SANITASI                | 2           | 2                | 100                  |
| D. PERIZINAN YANG TERBIT MELALUI AKUN OSS RBA DPMPTSP TEMANGGUNG KARENA PENERBITANNYA MEMBUTUHKAN VERIFIKASI TEKNIS OLEH DPMPTSP TEMANGGUNG BESERTA TIM TEKNIS |  |             |                  |                      |
| 13   | SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) | 1.536       | 1.536            | 100                  |
| 14   | Persetujuan PKPLH                              | 174         | 174              | 100                  |



| NO             | JENIS IZIN   | TOTAL       |                  |                      |
|----------------|--|-------------|------------------|----------------------|
|                |  | JUMLAH IZIN | IZIN YANG TERBIT | PROSEN TASE IZIN (%) |
| 15             | Persetujuan Lingkungan   | 4           | 4                | 100                  |
| 16             | TANDA DAFTAR GUDANG  | 9           | 9                | 100                  |
| 17             | PKKPR DARAT (NON UMK)  | 17          | 17               | 100                  |
| 18             | PKKPR DARAT (UMK)  | 113         | 113              | 100                  |
| 19             | SPPIRT   | 21          | 21               | 100                  |
| 20             | LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN di KABUPATEN/KOTA | 0           | 0                | 100                  |
| 21             | SERTIFIKAT LAIK HYGINE SANITASI  | 61          | 61               | 100                  |
| 22             | SERTIFIKAT STANDAR   | 796         | 796              | 100                  |
| 23             | SERTIFIKAT STANDAR KEDAI JAMU  | 8           | 8                | 100                  |
| 24             | SERTIFIKAT STANDAR PANTI SEHAT BERKELOMPOK                             | 4           | 4                | 100                  |
| 25             | SERTIFIKAT STANDAR TOKO ALAT KESAHATAN                                 | 3           | 3                | 100                  |
| 26             | SERTIFIKAT STANDAR TOKO KOSMETIKA                                      | 11          | 11               | 100                  |
| 27             | Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Kaki Lima                   | 1           | 1                | 100                  |
| 28             | SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL                               | 3           | 3                | 100                  |
| 29             | IZIN APOTEK  | 17          | 17               | 100                  |
| 30             | IZIN   | 6           | 6                | 100                  |
| 31             | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH  | 1           | 1                | 100                  |
| 32             | PSAT-PDUK  | 50          | 50               | 100                  |
| E. MPP DIGITAL |  |             |                  |                      |
| 33             | Surat Izin Praktik Apoteker  | 58          | 58               | 100                  |
| 34             | Surat Izin Praktik Dokter  | 75          | 75               | 100                  |
| 35             | Surat Izin Praktik Dokter Gigi   | 27          | 27               | 100                  |
| 36             | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Anak                               | 7           | 7                | 100                  |
| 37             | Surat Izin Praktik Bidan Profesi                                       | 21          | 21               | 100                  |
| 38             | Surat Izin Praktik Bidan Vokasi  | 26          | 26               | 100                  |
| 39             | Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 5                                | 67          | 67               | 100                  |
| 40             | Surat Izin Praktik Bidan Vokasi Level 6                                | 4           | 4                | 100                  |
| 41             | Surat Izin Praktik Ners  | 51          | 51               | 100                  |
| 42             | Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan                          | 0           | 0                | 100                  |
| 43             | Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Anak                     | 1           | 1                | 100                  |
| 44             | Surat Izin Praktik Perawat Vokasi                                      | 98          | 98               | 100                  |
| 45             | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut                              | 3           | 3                | 100                  |
| 46             | Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi                               | 46          | 46               | 100                  |
| 47             | Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 5                       | 30          | 30               | 100                  |
| 48             | Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi Level 6                       | 2           | 2                | 100                  |
| 49             | Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan               | 5           | 5                | 100                  |
| 50             | Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5             | 8           | 8                | 100                  |
| 51             | Surat Izin Praktek Fisioterapis Level 5                                | 6           | 6                | 100                  |
| 52             | Surat Izin Praktek Fisioterapis  | 5           | 5                | 100                  |
| 53             | Surat Izin Praktek Nutrisionis   | 6           | 6                | 100                  |
| 54             | Surat Izin Praktek Nutrisionis Level 6                                 | 1           | 1                | 100                  |
| 55             | Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5                 | 7           | 7                | 100                  |
| 56             | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi        | 3           | 3                | 100                  |

| NO     | JENIS IZIN  | TOTAL       |                  |                      |
|--------|---|-------------|------------------|----------------------|
|        |   | JUMLAH IZIN | IZIN YANG TERBIT | PROSEN TASE IZIN (%) |
| 57     | Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan                               | 7           | 7                | 100                  |
| 58     | Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 5                                   | 107         | 107              | 100                  |
| 59     | Surat Izin Praktik Perawat Vokasi Level 6                                   | 1           | 1                | 100                  |
| 60     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | 5           | 5                | 100                  |
| 61     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Penyakit Dalam                          | 4           | 4                | 100                  |
| 62     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Radiologi                               | 2           | 2                | 100                  |
| 63     | Surat Izin Praktik Elektromedis Level 5                                     | 3           | 3                | 100                  |
| 64     | Surat Izin Praktik Fisioterapis Level 5                                     | 6           | 6                | 100                  |
| 65     | Surat Izin Praktik Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah                 | 4           | 4                | 100                  |
| 66     | Surat Izin Praktik Optometris   | 1           | 1                | 100                  |
| 67     | Surat Izin Praktek Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5            | 5           | 5                | 100                  |
| 68     | Surat Izin Praktek Psikologi Klinis   | 3           | 3                | 100                  |
| 69     | Surat Izin Praktek Radiografer  | 6           | 6                | 100                  |
| 70     | Surat Izin Praktek Radiografer 5  | 3           | 3                | 100                  |
| 71     | Surat Izin Praktek Radiografer 6  | 1           | 1                | 100                  |
| 72     | Surat Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah                                  | 3           | 3                | 100                  |
| 73     | Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan                               | 6           | 6                | 100                  |
| 74     | Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan 5                             | 2           | 2                | 100                  |
| 75     | Surat Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6                       | 3           | 3                | 100                  |
| 76     | Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6                      | 2           | 2                | 100                  |
| 77     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mata                                    | 6           | 6                | 100                  |
| 78     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Psikiatri                               | 2           | 2                | 100                  |
| 79     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal                | 1           | 1                | 100                  |
| 80     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik                     | 1           | 1                | 100                  |
| 81     | Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5         | 0           | 0                | 100                  |
| 82     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Mulut                             | 2           | 2                | 100                  |
| 83     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah Syaraf                            | 1           | 1                | 100                  |
| 84     | Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah                                   | 3           | 3                | 100                  |
| 85     | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 5                           | 1           | 1                | 100                  |
| 86     | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Level 6                           | 1           | 1                | 100                  |
| JUMLAH |   | 14.989      | 14.989           | 100                  |

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicanik.go.id, mppd

### 6. Realisasi Proyek Investasi PMA dan PMDN

Proyek investasi PMA dan PMDN adalah kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh investor sebagai bentuk penanaman modal, baik dari luar negari (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kegiatan proyek investasi merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal yang menghasilkan kegitan ekonomi, pembangunan usaha, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung. Rumus yang digunakan untuk menghitung Realsiasi Proyek Investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:



kesehatan, layanan perpajakan, Layanan Imigrasi, Layanan Pendidikan, layanan perhubungan, Perindustrian dan tenaga kerja, BNN, hingga layanan perbankan. Penambahan unit layanan juga bertujuan mengurangi waktu tunggu, memperbaiki kualitas pelayanan, serta meningkatkan transparansi birokrasi.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah layanan di MPP Temanggung mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendukung kemudahan berusaha, dan mendorong percepatan pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung Peningkatan Jumlah Jenis layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik) adalah sebagai berikut:

Peningkatan Layanan=Total Layanan Tahun Berjalan–Total Layanan Tahun Sebelumnya

Tabel 8.1  
Jenis Layanan  
Tahun 2024-2025 (TW IV)

| No. | OPD KABUPATEN TEMANGGUNG  |    | Jenis Layanan   |
|-----|---|----|---|
| 1   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( 9 Jenis Layanan) | 1  | Pelayanan Izin Berusaha Melalui Sistem OSS  |
|     |   | 2  | Pelayanan Izin Pemecahan IMB  |
|     |   | 3  | Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame  |
|     |   | 4  | Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah   |
|     |   | 5  | Pelayanan Mengantar Izin Non Retribusi  |
|     |   | 6  | Pelayanan Izin Trayek   |
|     |   | 7  | Pelayanan Izin Kesehatan Manusia  |
|     |   | 8  | Pelayanan Izin Kesehatan Hewan  |
|     |   | 9  | Helpdesk OSS  |
| 2   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (3 Jenis Layanan)                 | 10 | Pelayanan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/SLF)                                  |
|     |   | 11 | Pelayanan Informasi Tata Ruang (PKKPR)  |
|     |   | 12 | Pelayanan Sewa Alat Berat dan Sobot BIMA  |
| 3   | Dinas Sosial (5 Jenis Layanan)  | 13 | Usulan dan Verifikasi Kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial                           |
|     |   | 14 | Prosedur pengelolaan Data Penerima Bantuan Iur (PBI ) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) APBD |
|     |   | 15 | Penerbitan Perizinan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)                                      |
|     |   | 16 | Perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB)   |
|     |   | 17 | Penerbitan Surat Izin Operasional (SIOP) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)                 |
|     |   |    |   |
| 4   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (7 Jenis Layanan)                 | 18 | Pembuatan Kartu Keluarga  |
|     |   | 19 | Pembuatan KTP Elektronik  |
|     |   | 20 | Pembuatan Kartu Identitas Anak  |
|     |   | 21 | Surat Keterangan Pindah   |
|     |   | 22 | Pembuatan Akta Kelahiran  |
|     |   | 23 | Pembuatan Akta Kematian   |
|     |   | 24 | Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)   |
|     |   |    |   |
| 5   | Dinas Kesehatan (9 Jenis Layanan)   | 25 | Penilaian Kesesuaian StandarIzin Operasional Puskesmas                                      |
|     |   | 26 | Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional RumahSakit                                    |
|     |   | 27 | Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik  |
|     |   | 28 | Penilaian Kesesuaian Standar Apotek   |
|     |   | 29 | Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat  |
|     |   | 30 | Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT)                      |
|     |   | 31 | Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan  |
|     |   | 32 | Perizinan Depot Air Minum   |
|     |   | 33 | Rekomendasi Perizinan Jasa Boga   |
|     |   |    |   |
| 6   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (6 Jenis Layanan)    | 34 | Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Untuk Usaha Mikro                |
|     |   | 35 | Pelayanan Tera dan Tera Ulang   |

| No. | OPD KABUPATEN TEMANGGUNG  |    | Jenis Layanan   |
|-----|---|----|---|
|     |   | 36 | Pelayanan Sewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah   |
|     |   | 37 | Pelayanan UMKM Binaan   |
|     |   | 38 | Pelayanan Pendampingan, Pengajuan Hak Paten   |
|     |   | 39 | Pelayanan Pengesahan Pembubaran Koperasi  |
| 7   | Dinas Perhubungan (2 Jenis Layanan)   | 40 | Pembuatan SK Izin Trayek Angkutan 5 Tahunan   |
|     |   | 41 | Pembuatan Kartu Pengawasan Angkutan   |
| 8   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (2 Jenis Layanan) | 42 | Izin Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)  |
|     |   | 43 | Penetapan Siteplan Perumahan  |
| 9   | Helpdesk OSS (4 Jenis Layanan)  | 44 | Konsultasi NIB Badan Usaha  |
|     |   | 45 | Konsultasi Sertifikat Standard  |
|     |   | 46 | Konsultasi LKPM   |
|     |   | 47 | Penanganan Kendala OSS  |
| 10  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (6 Jenis Layanan)                            | 48 | Pendaftaran AK1 (Surat Pengantar Kerja)   |
|     |   | 49 | Penyampaian Layanan Calon Pekerja Migran Indonesia  |
|     |   | 50 | Rekomendasi Magang Jepang   |
|     |   | 51 | Pelayanan Informasi Lowongan Pekerjaan  |
|     |   | 52 | Pendaftaran Pelatihan BLK   |
|     |   | 53 | Pelayanan Informasi Sektor Industri (SIINas, Sertifikasi Halal, TKDN, SNI, HAKI)                          |
| 11  | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (15 Jenis Layanan)                | 54 | Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)            |
|     |   | 55 | Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri          |
|     |   | 56 | Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Bersama          |
|     |   | 57 | Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Klinik Hewan                                 |
|     |   | 58 | Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah Sakit Hewan                            |
|     |   | 59 | Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Praktek Dokter Hewan Negara Asing                       |
|     |   | 60 | Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan Dan Paramedik Veteriner |
|     |   | 61 | Rekomendasi Izin Usaha Toko Obat Hewan  |
|     |   | 62 | Rekomendasi Izin usaha Pemotongan Hewan Ruminansia  |
|     |   | 63 | Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Unggas  |
|     |   | 64 | Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan kesayangan              |
|     |   | 65 | Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan Kesayangan                  |
|     |   | 66 | Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan   |
|     |   | 67 | Rekomendasi Izin Usaha Pakan  |
|     |   | 68 | Rekomendasi Izin Usaha Peternakan   |
| 12  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ( 6 Jenis Layanan)                     | 69 | Perizinan Pendirian Sekolah (PAUD, SD, SMP)   |
|     |   | 70 | Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP   |
|     |   | 71 | Legalisir Ijazah  |
|     |   | 72 | Perizinan Magang  |
|     |   | 73 | Pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional   |
|     |   | 74 | Surat Keterangan Pengganti Ijazah   |
| 13  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (3 Jenis Layanan)          | 75 | Layanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)                                   |
|     |   | 76 | Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)   |
|     |   | 77 | Layanan Informasi Pajak Daerah  |
| 14  | UKPBJ (Bagian PBJ SETDA TMG) ( 2 Jenis Layanan)                                   | 78 | Registrasi dan verifikasi penyediaan barang/jasa (UKPBJ)  |
|     |   | 79 | Penayangan produk pada katalog lokal pemkab temanggung (UKPBJ)  |
|     | <b>PD PROVINSI JATENG</b>   |    |   |
| 15  | Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah/SAMSAT (2 Jenis layanan)                   | 80 | Layanan Pengesahan STNK   |
|     |   | 81 | Pembayaran Pajak Tahunan  |
|     | <b>BUMD Provinsi Jateng</b>   |    |   |
| 16  | Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (1 Jenis Layanan)                             | 82 | Layanan Pembayaran (Payment Point)  |
|     | <b>KEMENTRIAN/LEMBAGA</b>   |    |   |
| 17  | Kantor Imigrasi Keas II non TPI   | 83 | Pembuatan Paspor Baru   |

| No. | OPD KABUPATEN TEMANGGUNG   |     | Jenis Layanan   |
|-----|--|-----|---|
|     | Wonosobo (2 Jenis Layanan)   |     |   |
|     |  | 84  | Penggantian Buku Paspor Baru Habis Masa Berlaku           |
| 18  | Kepolisian Resor/POLRES (3 Jenis Layanan)                          | 85  | Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian             |
|     |  | 86  | Pembuatan dan Penerbitan Laporan Polisi                   |
|     |  | 87  | Pelaporan, Informasi dan Konsultasi Hukum                 |
| 19  | BPS (Badan Pusat Statistik) ( 4 Jenis Layanan)                     | 88  | Layanan Penyediaan Produk Statistik                       |
|     |  | 89  | Layanan Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik)         |
|     |  | 90  | Layanan Data  |
|     |  | 91  | Layanan Penyediaan Produk Statistik                       |
| 20  | Kejaksaan Negeri (3 Jenis Layanan)                                 | 92  | Pelayanan Tilang  |
|     |  | 93  | Pelayanan Hukum Secara Lisan                              |
|     |  | 94  | Penyuluhan Hukum  |
| 21  | Kementerian Agama (22 Jenis Layanan)                               | 95  | Rekomendasi Bantuan untuk Masjid dan Mushola              |
|     |  | 96  | Rekomendasi Bantuan Majelis Taklim                        |
|     |  | 97  | Rekomendasi Bantuan untuk Madrasah                        |
|     |  | 98  | Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim                 |
|     |  | 99  | Pengukuran Arah Kiblat                                    |
|     |  | 100 | Rekomendasi Bantuan untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren      |
|     |  | 101 | Izin Operasional untuk Madin/TPQ/Pondok Pesantren         |
|     |  | 102 | Rekomendasi Pembuatan Paspor Studi Lanjut ke Luar Negeri  |
|     |  | 103 | Rekomendasi Pengangkatan Kepala Madrasah                  |
|     |  | 104 | Legalisir Ijazah  |
|     |  | 105 | Penandatanganan Surat Keterangan Pengganti Ijazah         |
|     |  | 106 | Informasi Haji dan Umroh                                  |
|     |  | 107 | Pendaftaran Ibadah Haji                                   |
|     |  | 108 | Pelimpahan Porsi Haji                                     |
|     |  | 109 | Pembatalan Ibadah Haji                                    |
|     |  | 110 | Rekomendasi Bantuan untuk Pendidikan Agama Islam          |
|     |  | 111 | Rekomendasi Bantuan Keagamaan Budha                       |
|     |  | 112 | Izin Operasional Sekolah Minggu Budha                     |
|     |  | 113 | Rekomendasi Bantuan Bantuan Keagamaan Kristen & Katholik  |
|     |  | 114 | Izin Operasional Sekolah Minggu Kristen & Katholik        |
|     |  | 115 | Pendaftaran Sertifikat Halal                              |
|     |  | 116 | Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf                        |
| 22  | BPJS Ketenagakerjaan ( 4 Jenis Layanan)                            | 117 | Informasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)                 |
|     |  | 118 | Pendaftaran Kepesertaan                                   |
|     |  | 119 | Informasi Program dan Manfaat                             |
|     |  | 120 | Layanan Informasi Pengajuan Klaim                         |
| 23  | BPJS Kesehatan (3 Jenis Layanan)                                   | 121 | Pelayanan Administrasi                                    |
|     |  | 122 | Pelayanan Informasi Kepesertaan                           |
|     |  | 123 | Pelayanan Pengaduan                                       |
| 24  | Kantor Pelayanan Pajak Pratama ( 4 Jenis Layanan)                  | 124 | Layanan Aktivasi EFIN                                     |
|     |  | 125 | Pembuatan Kode Billing Pajak                              |
|     |  | 126 | Help Desk/Konsultasi Perpajakan                           |
|     |  | 127 | Pemadanan Data Mandiri(NIK-NPWP)                          |
| 25  | Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (6 Jenis Layanan) | 128 | Layanan Pengecekan Sertifikat                             |
|     |  | 129 | Layanan Informasi Berkas                                  |
|     |  | 130 | Layanan Zona Nilai Tanah (ZNT)                            |
|     |  | 131 | Layanan Cek Plot Tanah                                    |
|     |  | 132 | Layanan Hak Tanggungan Elektronik                         |
|     |  | 133 | Layanan Roya Elektronik                                   |
| 26  | BUMN TASPEN (Persero) (1 Jenis Layanan)                            | 134 | Pelayanan Program Pensiun                                 |
|     |  |     |   |
|     |  |     |   |
| 27  | BP3MI  | 135 | Layanan penempatan orientasi pra pemberangkatan skema p2p |
|     |  | 136 | Pelayanan perekaman E-ID PMI SSW Jepang                   |
|     |  | 137 | Crisis Center   |

### 8. Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi

Persentase total terhadap target investasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar realisasi investasi yang telah dicapai



dibandingkan dengan terget investasi yang ditetapkan. Rumus digunakan dalam menghitung persentase realisasi total terhadap target investasi adalah sebagai berikut :

Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi =

Realisasi Investasi

Target Investasi

x 100%

Tabel 8.1  
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI INVESTASI  
TAHUN 2024-2025 (TW III)

| No. | Tahun | Realisasi Investasi (Milyar) |           | Capaian Kinerja (%) |
|-----|-------|------------------------------|-----------|---------------------|
|     |       | Target                       | Realisasi |                     |
| 1   | 2021  | 432                          | 1.497     | 100                 |
| 2   | 2022  | 520                          | 1.836     | 100                 |
| 3   | 2023  | 625                          | 2.001     | 100                 |
| 4   | 2024  | 2.097                        | 2.145     | 100                 |
| 5   | 2025  | 2.150                        | 2.159     | 100                 |

Sumber : IKPD DPMTSP tahun 2021 s.d 2025

Capaian realisasi investasi dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan performa yang sangat kuat karena realisasi selalu jauh melebihi target. Pada tahun 2024, capaian investasi sedikit melampaui target sehingga kinerjanya tetap terjaga. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga Triwulan IV, realisasi investasi melebihi target

9. Presentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi kinvestasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah :

Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan

Jumlah event promosi yang harus diikuti

X 100%

**Tabel 4.1**  
**Persentase Promosi Penanaman Modal**  
**Tahun 2020-2025**

| No | Uraian                                  | Tahun |      |      |      |      |               |
|----|---|-------|------|------|------|------|---------------|
|    |   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>TW II |
| 1  | Jumlah Promosi yang diikuti             | 1     | 3    | 8    | 3    | 3    | 3             |
| 2  | Jumlah Event Promosi yang harus diikuti | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1             |
|    | Persentase                              | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa *Event* Promosi yang mengikuti dari tahun 2020 – 2025 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020 kegiatan Promosi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan. Kegiatan Promosi pada tahun 2025 disamping melalui event-event, prososi juga dilaksanakan melalu media sosial yang ada.

**10.Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo**

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas. Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat.

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah :

Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo

Permohonan perizinan.

X 100%

**Tabel 10.1**  
**Persentase Permohonan Izin Bebas Calo**  
**Tahun 2020-2025 TW IV**

| No | Uraian                            | Tahun |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| 1  | Jumlah Permohonan Izin bebas calo | 6575  | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 10.959 | 14.989 |
| 2  | Jumlah permohonan izin            | 6575  | 10.294 | 11,791 | 13.781 | 10.959 | 14.989 |
| 3  | Persentase                        | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Tabel 10.1 menunjukkan bahwa jumlah permohonan izin bebas calo dari tahun 2020 hingga 2025 Triwulan IV selalu *sama* dengan jumlah permohonan izin yang masuk. Hal ini menghasilkan persentase 100% pada seluruh tahun yang ditampilkan. Dengan demikian, seluruh permohonan izin yang diajukan setiap tahunnya diproses melalui mekanisme resmi tanpa indikasi penggunaan jasa perantara atau calo. Data ini menggambarkan konsistensi dalam penerapan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan bebas calo selama enam tahun terakhir.

## 11. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal:

- a) **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan dampak ekonomi.
- b) **Pengolahan Data:** Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data.
- c) **Penyimpanan Data:** Mengelola database yang terstruktur dengan baik agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif.
- d) **Penyebaran Informasi:** Membagikan informasi kepada stakeholder, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan, situs web, dan platform lainnya.
- e) **Pemantauan dan Evaluasi:** Mengawasi perkembangan investasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa depan.
- f) **Kerjasama Lintas Sektor:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal.

Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rumus Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah :

Jumlah dokumen data yang disajikan

Jumlah dokumen data yang wajib disajikan

X 100

Tabel 11.1  
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2020-2025

| No | Uraian                           | Tahun |      |      |      |      |      |
|----|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                                  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  | Jumlah Data Yang Disajikan       | n.a   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | Jumlah Data Yang Wajib Disajikan | n.a   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | Persentase                       | n.a   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber data : Oss.go.id  
Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2020 hingga 2025 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

12.Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan, izin, dan rencana yang telah disetujui.

a. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian adalah upaya pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan investasi agar sesuai dengan perencanaan pembangunan. Fokus Pengendalian adalah sebagai berikut:

- Memastikan investasi sesuai dengan izin dan rencana yang diajukan;
- Mengelola potensi risiko agar tidak menimbulkan dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan;
- Memberikan arahan atau pembinaan kepada perusahaan jika ditemukan ketidaksesuaian.

b. Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan adalah kegiatan memeriksa, memonitor, dan mengevaluasi pelaku usaha terhadap kewajiban dan ketentuan perizinan investasi. Fokus pengawasan adalah sebagai berikut:

- Memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (OSS, perizinan dasar, komitmen, laporan LKPM).
- Memantau realisasi investasi di lapangan.

- Menilai dampak dan kinerja perusahaan sesuai izin yang diberikan.
  - Mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian.
- c. Tujuan Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan pengawasan dan pengendalian penanaman modal adalah untuk menjamin kegiatan investasi berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, atau praktik tidak sehat. Masyarakat dan pelaku usaha dapat terlindungi serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan atau proyek investasi dibandingkan dengan jumlah target yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengendalian dan pengawasan Penanaman modal =

Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang terealisasi

Jumlah Target Pengawasan dan Pengendalian

X 100%

Tabel 12.1  
Persentase Perusahaan  
Tahun 2019-2024

| No | Uraian                            | Tahun |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1  | Jumlah Perusahaan yang didampingi | n.a   | n.a  | n.a  | n.a  | 149  | 15   |
| 2  | Jumlah Perusahaan Wajib LKPM      | n.a   | n.a  | n.a  | n.a  | 12   | 12   |
|    | Persentase                        | n.a   | n.a  | n.a  | n.a  | 100  | 100  |

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan IV

Temanggung, 7 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740508 200312 1 008